

## Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Pengeluaran Kas Pada Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya

**Leo Rizki Mubarak**  
UPN Veteran Jawa Timur

**Hero Priono**  
UPN Veteran Jawa Timur

Korespondensi penulis: [leorizkym@gmail.com](mailto:leorizkym@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine and evaluate the government's internal control system and cash expenditure procedures in the Government and People's Welfare Section of Surabaya City are in accordance with applicable regulations or not. This research was carried out at the Surabaya City Government and People's Welfare Office located in the Genteng Village government building, Genteng District, Surabaya City. The analytical method used in this study is the Descriptive Analysis Method. The data collection techniques used are observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Cash Expenditure System and Procedure implemented in the Government and People's Welfare Section of Surabaya City has been running well in accordance with Permendagri Number 13 of 2006 concerning Regional Financial Management Guidelines. The internal control system of cash expenditure in the Government and People's Welfare Section of Surabaya City has also been implemented well but has not been maximally marked by the lack of maximum implementation of policies on human resource development so that employees are still found who lack mastery related to cash expenditures and the constraints of the duties of the finance and accounting department.*

**Keywords:** *Internal Control System, Procedures, Cash disbursement*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem pengendalian internal pemerintah dan prosedur pengeluaran kas pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku atau tidak. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya yang berlokasi di gedung pemerintahan Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas yang dilaksanakan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem pengendalian internal pengeluaran kas di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya juga sudah diterapkan dengan baik namun belum maksimal ditandai dengan belum maksimalnya penerapan kebijakan tentang pembinaan sumber daya manusia sehingga masih ditemui pegawai yang kurang menguasai terkait pengeluaran kas dan perangkapan tugas bagian keuangan dan akuntansi.

**Kata kunci:** Sistem Pengendalian Internal, Prosedur, Pengeluaran kas

### LATAR BELAKANG

Era reformasi telah membawa beberapa perubahan dalam ketatanegaraan salah satunya perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam hal otonomi daerah sehingga suatu daerah dapat menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri (Hakim, 2016:112). Sehingga akan memberikan dampak yang positif terhadap daerah-daerah yang tertinggal karena dapat mandiri dan memajukan pembangunan nasional serta meningkatkan perkenomian nasional. Akibatnya akan memberikan pengaruh pada regulasi sistem keuangan pemerintahan

di daerah. Pemerintah daerah (Pemda) merupakan pihak yang menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan (Trisnaningsih & Fitri R., 2022). Pemda tersebut memiliki lingkup kekuasaan administrative yang lebih terbatas di suatu negara, yang mana di negara Indonesia ini dibagi menjadi beberapa wilayah-wilayah provinsi dan dari daerah-daerah provinsi tersebut terbagi lagi menjadi wilayah kota serta kabupaten. Pengelolaan keuangan daerah terdapat pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target anggaran (Hakim, 2016:114). Transparansi dan akuntabilitas pada era reformasi ini semakin meningkat dalam hal mengelola keuangan daerah, sehingga laporan pertanggungjawaban wajib disusun oleh Pemerintah Daerah, yaitu laporan realisasi anggaran menggunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang berlaku ((Darise, 2018).

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kepala daerah sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan daerah lebih berperan sebagai pengambil keputusan, sedangkan pelaksana pengelolaan keuangan daerah, ketua organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai pengguna anggaran. Pedoman Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penyempurnaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, tata cara Akuntansi yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah meliputi tata cara Akuntansi Penerimaan Kas Akuntansi Pengeluaran Kas, Akuntansi Aset dan Akuntansi selain kas.

Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya agar dapat tercapai target dan tujuan suatu pembangunan. Sistem pengendalian internal meliputi berbagai kebijakan terkait dengan catatan keuangan, memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah, penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, dan memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan Pemerintah. Sehingga jika tidak terlaksana

pengendalian internal dengan baik maka akan mudah terjadi penggelapan kas (Mulyadi, 2016:432)

Penyelewengan dan Penyimpangan kas dapat dihindari dengan adanya suatu sistem pengeluaran kas yang baik, dengan adanya sistem informasi yang memuaskan, maka hal-hal yang merugikan dapat dihindari dan diminimalisasi. Sebab itu organisasi harus dapat merancang dan membuat suatu sistem dan prosedur akuntansi terhadap kas yang dapat mengurangi bahkan meniadakan resiko penggelapan dan penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengeluaran Kas juga merupakan komponen sumber daya yang perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya agar dapat tercapai target dan tujuan. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Cikal bakal SPIP ini dimulai dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 30 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/4/2004.

Unsur-unsur Pengawasan Melekat adalah pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, dan review intern. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2008 pemerintah melakukan penyempurnaan atas sistem pengendalian intern yang telah ada sebelumnya melalui penerbitan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan adaptasi dari *COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions)-Internal Control Integrated Framework*. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Oleh karena itu, berdasar kan PP No. 60 Tahun 2008 untuk lebih meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang efektif, khususnya dalam pengeluaran kas perlu adanya sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya sistem pengendalian internal bertujuan untuk menghindari segala bentuk penyelewengan, penyalahgunaan, penggelapan, serta pemborosan harta kekayaan negara terhadap kas dan guna memperbaiki adanya kesalahan dan penyelewengan yang terjadi dan dapat mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal tersebut.

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berada di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dalam mengelola keuangan harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai sebagai salah satu tindakan preventif terhadap adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Sebagai organisasi sektor publik yang terlibat dalam pemerintahan dan masyarakat, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Kota Surabaya menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaan keuangan untuk membahas terkait pengeluaran kas. Misalnya: Pembayaran gaji karyawan, pembayaran alat tulis kantor, pembayaran tenaga kontrak, pembayaran bahan bakar minyak (BBM), pembayaran pemeliharaan peralatan, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran tagihan air, listrik dan telepon. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan sistem akuntansi dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Pengeluaran Kas pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya”.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian intern atas fungsi pengeluaran kas yang diterapkan pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya telah memenuhi syarat sistem pengendalian intern dan sudah dapat dikatakan efektif.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Teori Pengelolaan (*Stewardship Theory*)**

Teori stewardship menggambarkan situasi di mana manajemen tidak lah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen (Van Slyke, 2006).

### **2. Kas**

Kas adalah segala sesuatu, baik yang diterima berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya (Soemarso, 2015:296)

### **3. Pengeluaran Kas**

Pengeluaran kas adalah suatu transaksi yang menimbulkan berkurangnya saldo kas dan bank milik perusahaan yang diakibatkan adanya pembelian tunai, pembayaran utang maupun hasil transaksi yang menyebabkan berkurangnya kas. Pengeluaran kas dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya yang jumlahnya relatif kecil (Soemarso, 2015:297).

### **4. Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, teknik, dan beberapa macam skala yang telah dikoordinasikan demi menjaga aset-aset organisasi, melakukan pengecekan dalam keandalan dan ketelitian data akuntansi, memicu efisiensi dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2016:129)

### **5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang lengkap dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang wajar melalui kegiatan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, kehandalan keuangan pelaporan, melindungi aset negara dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal mempunyai tujuan yaitu:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Pelaporan keuangan yang andal
3. Pengamanan aset negara
4. Mematuhi hukum dan peraturan.

### **Penelitian Terdahulu**

(Devi, 2021) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengeluaran Kas Pada Lembaga Pendidikan (Studi Kasus Pada Smpn 1 Teluk Kuantan). Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah pengendalian internal terhadap pengeluaran kas yang ada pada SMPN 1 Teluk Kuantan belum sepenuhnya sesuai dengan teori Mulyadi, karena masih ada kekurangan.

(Masanae et al., 2022) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado.

Hasil penelitian menunjukkan yaitu Pengendalian internal pengeluaran kas pada Kantor Kecamatan Malalayang sudah baik, karena meliputi lingkungan pengendalian yang sudah terdapat kepemimpinan yang kondusif dan struktur organisasi yang jelas, aktivitas pengendalian dengan adanya otorisasi hanya oleh pejabat yang berwenang, komunikasi dan informasi dengan adanya konfirmasi mengenai ketidakjelasan dalam laporan pengeluaran kas, serta pemantauan yaitu dengan adanya pengawasan dari BPKP dan Inspektorat.

(Pangkey et al., 2021) dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Utama. Hasil penelitian menemukan sistem Pengendalian intern pengeluaran kas kecil pada PT. Bank SulutGo Cabang Utama sudah memadai, melihat Lingkungan pengendalian yang berupa struktur organisasi telah berjalan efektif, metode pencatatan telah berjalan efektif serta mampu memisahkan tanggung jawab antara fungsi kas, fungsi akuntansi dan fungsi pemeriksa intern.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, penelitian ini menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya dengan menggunakan sumber data yang ada. Penelitian ini berhubungan dengan sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya.

### **Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, digunakan data kualitatif berupa hasil wawancara yang menguraikan informasi umum Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya serta bagaimana prosedur mengenai sistem pengendalian intern pengeluaran kas.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari perusahaan untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya.

#### **3. Metode Pengumpulan Data**

- a. Wawancara, dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan Bapak Arief Boediarso selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya,

Bapak Kartiko selaku Kasubag Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Ibu Sapta selaku bendahara.

- b. Dokumentasi, dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian skripsi.

### **Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu metode pembahasan yang mengumpulkan, menyusun, menganalisis data, memperoleh gambaran sebenarnya bagaimana sistem pengendalian intern pengeluaran kas pada Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Tahap pertama, penulis mengumpulkan data melalui kegiatan wawancara yang dilakukan kepada Pejabat yang berwenang untuk bertanya mengenai gambaran perusahaan dan pengendalian intern. Data yang berkaitan dapat diolah dan disajikan dalam bentuk bagan alir (*flowchart*).
2. Tahap kedua, penulis membahas hasil data wawancara yang dilakukan untuk mengetahui sistem pengendalian intern pengeluaran kas yang diterapkan di Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan *COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission)*.
3. Tahap ketiga, penulis mengidentifikasi struktur pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan *COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission)* berdasarkan kelima unsur komponen pengendalian intern berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan Pejabat yang berwenang.
4. Tahap keempat, penulis menarik kesimpulan mengenai sistem pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan *COSO* untuk mengetahui sistem pengendalian intern pengeluaran kas.
5. Tahap kelima, penulis memberikan saran kepada Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan *COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission)*.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya yang beralamat di Gedung Pemerintahan Kota Surabaya Lt. V Jl. Jimerto 25 - 27 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Kota Surabaya. Waktu penelitian yaitu dimulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai.

### **Organisasi Pengelola Keuangan di Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya**

Dalam pengelolaan keuangan pengeluaran kas di Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, pihak-pihak yang teglibat dalam memegang peranan adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kuasa pengguna anggaran merupakan pejabat selaku pemegang kewenangan atau kekuasaan sebagai penggunaan anggaran perangkat daerah. Kuasa pengguna anggaran di Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya adalah Kepala Bagian selaku pimpinan dalam organisasi.
2. Bendahara Pengeluaran. merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Pejabat administrasi keuangan adalah pejabat struktural yang menjalankan fungsi administrasi keuangan pada satuan kerja perangkat daerah.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat atau pegawai ASN yang menduduki jabatan terstruktur pada satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan program sesuai dengan bidang pekerjaannya.
5. Bendahara Umum Daerah (BUD). Bendahara Umum Daerah adalah pejabat PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, yaitu pejabat yang bertanggung jawab menerima, menyimpan, membayar, atau memindahkan uang atau surat berharga dan/atau barang dagangan daerah.



## **Pelaksanaan Prosedur Pengeluaran Kas Pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya**

Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya melakukan transaksi pengeluaran kas sesuai dengan kebutuhan. Adapun proses pengeluaran kas pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya terdiri dari:

### **1. Dokumen yang digunakan**

- a) surat perintah pencairan dana (SP2D)
- b) nota debit bank
- c) bukti transaksi pengeluaran kas lainnya. Bukti dilengkapi dengan:
  - 1) Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
  - 2) Surat Penyediaan Dana (SPD), yaitu dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
  - 3) Kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang atau jasa
- d) Jurnal
- e) Buku besar kas
- f) Buku besar pembantu pengeluaran kas

### **2. Prosedur Pengeluaran kas**

Prosedur pengeluaran kas yang dilakukan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya mencakup belanja modal dan operasional. Prosedur diawali dengan dibuat surat penyediaan dana oleh pengguna anggaran pada SKPD tersebut lalu diminta persetujuan kepada BUD untuk pencairan. Dasar hukum pelaksanaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah termasuk Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya sebagai pengguna anggaran adalah DPA SKPD yang telah disetujui oleh sekretaris daerah dan disahkan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah.

### **3. Prosedur subsistem Akuntansi pengeluaran kas**

- a). Surat Penyediaan dana (SPD)

SPD adalah Surat Penyediaan dana yang dibuat oleh bendahara Pihak terkait beserta tugas dan fungsinya:

- 1) Kuasa Bendahara Dalam hal ini, yaitu:
  - a. Menganalisis DPA-SKPD
  - b. Menganalisa anggaran kas pemerintah (khususnya data per SKPD)
  - c. Menyiapkan draft SPD
  - d. Mendistribusikan SPD kepada pengguna anggaran
- 2) PPKD Dalam hal ini mempunyai tugas yaitu:
  - a. Meneliti draft SPD yang diajukan oleh kuasa BUD
  - b. Melakukan otorisasi SPD

b). Surat Permintaan Pembayaran

SPP (Surat Perintah Pembayaran) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

Pihak terkait:

- 1) Bendahara Pengeluaran, Dalam hal ini mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mempersiapkan dokumen SPP serta lampiran-lampirannya
  - b. Mengajukan SPP kepada PPK-SKPD. PPK-SKPD Dalam kegiatan ini mempunyai tugas mengverifikasi kelengkapan SPP yang telah diajukan Bendahara Pengeluaran

c). Surat Perintah Membayar (SPM)

SPM merupakan surat yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah dianggarkan DPA SKPD.

Pihak terkait:

- 1) PPK-SKPD Dalam kegiatan yaitu ini, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Menguji SPP beserta kelengkapannya
  - b. Menyiapkan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapan dan kebenarannya dan selanjutnya mengajukannya ke Pengguna Anggaran
  - c. Menerbitkan Surat Penolakan SPM bila SPP yang diajukan oleh Bendahara SKPD apabila tidak lengkap
  - d. Membuat register SPM
- 2) Kuasa Pengguna Anggaran Dalam kegiatan ini yaitu Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya memiliki tugas sebagai berikut:
  - a) Mengotorisasi dan menerbitkan SPM

b) Mengotorisasi Surat Penolakan SPM yang diterbitkan PPK-SKPD apabila SPP yang diajukan Bendahara SKPD tidak lengkap.

d). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang digunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. Pihak yang terkait beserta fungsinya:

1) Kuasa BUD Dalam kegiatan ini memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengujian atas kebenaran dan kelengkapan SPM
- b. Mencetak SP2D
- c. Mengirimkan SP2D ke Bank
- d. Membuat register SP2D

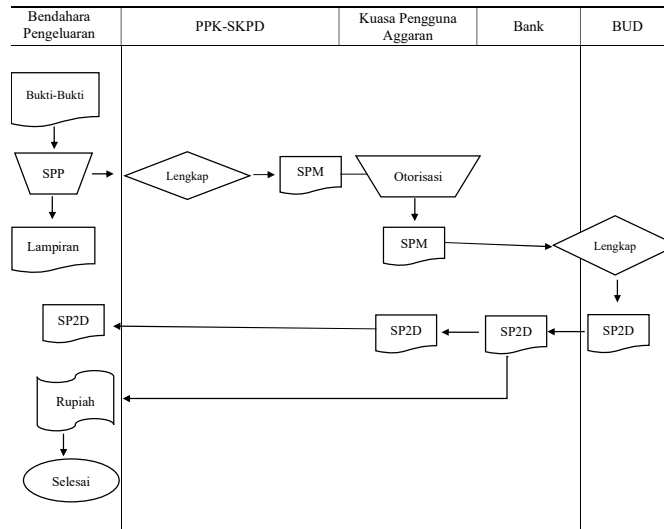
2) Pengguna Anggaran Dalam Kegiatan ini memiliki tugas menandatangani SP2D

3) Bendahara Pengeluaran SKPD mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan

e). Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran Bendahara Pengeluaran wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan/ganti uang/tambah uang persediaan (UP/GU/TU) kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD

f). Nota Permintaan Dana Nota permintaan dana merupakan nota yang digunakan untuk mencairkan dana melalui bendahara pengeluaran. Pada mekanisme ini tidak terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ), tetapi hanya menunjukkan nota atau kwitansi sebagai bukti pertanggungjawaban

Dibawah ini merupakan Alur Prosedur Pengeluaran Kas di Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Bagan Prosedur pengeluaran kas non tunai di Bapemkesra

### Evaluasi penerapan unsur-unsur SPIP pengeluaran kas dalam perspektif PP.No.60 Tahun 2008

Adapun penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas pada Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya pada dasarnya sudah baik jika diamati, berikut ini jika dinilai berdasarkan unsur – unsur sistem pengendalian internal:

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Nilai integritas dan etika yang ditanamkan oleh pimpinan sudah tepat karena bekerja dengan integritas dan mengambil sikap atau tindakan yang tegas dan disiplin terhadap pelanggar kebijakan ataupun prosedur yang diterapkan di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya belum mempunyai profesional akuntan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan juga sumber daya manusia di bidang keuangan belum memadai hal ini terjadi karena tenaga kerja yang ada untuk bagian ini kebanyakan sudah tua sehingga terkadang aktivitas operasional kurang efektif dan laporan keuangan menjadi tidak tepat waktu. Serta belum maksimalnya dan meratanya kegiatan seperti pelatihan, seminar, workshop, ataupun pengadaan diklat bagi pegawai dibagian keuangan sehingga pegawai kurang paham mengenai hal yang berkaitan dalam pengeluaran kas contohnya dokumen yang dibutuhkan dalam pengeluaran kas.

## 2. Penilaian Resiko

Dalam melakukan analisa resiko sudah sesuai karena telah dibentuk bagian verifikasi khusus untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan organisasi, sehingga laporan keuangan yang sudah diselesaikan dicek ulang keakuratannya. Dokumen-dokumen pengeluaran kas serta prosedur dalam pengeluaran kasnya pun sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah terkait. Untuk satu tahun terakhir pengeluaran kas dilakukan dengan non tunai sehingga risiko kecurangan lebih bisa diminimalisir.

## 3. Aktivitas Pengendalian

Prosedur pengendalian di Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya sudah cukup baik hal ini karena pihak organisasi memberlakukan otorisasi setiap dokumen pengeluaran kas oleh pejabat yang berwenang hanya saja dalam penandatanganan dokumen pernah mengalami keterlambatan dikarenakan pejabat yang berwenang tidak ada di kantor. Dalam proses administrasi pencairan dana atau transfer dana agar tidak mengalami keterlambatan maka proses pengumpulan dokumen dan pembuatan SPTD sudah dirubah menggunakan persetujuan melalui aplikasi, sehingga ketika pejabat yang berwenang sedang tidak berada di kantor penandatanganan dokumen tetap bisa dilaksanakan dimana saja dan kapan saja sehingga tidak mengalami keterlambatan mentransfer dana atau mencairkan dana. Keterlambatan pencairan dana seperti ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Untuk aktivitas pengeluaran kas pada tahun 2023 sudah efektif dan dikendalikan dengan baik hal itu dapat dilihat dari presentase pengeluaran kas yang diatas 70%. Pengendalian fisik atas dokumen dan catatan atas transaksi yang diterapkan belum maksimal. Untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan dan kehilangan atas dokumen dan catatan yang ada didalamnya sebaiknya ditempatkan di lemari khusus dan dikunci sehingga hanya orang atau pihak yang berwenang saja yang boleh menggunakannya. Selain itu untuk peminjaman dokumen dan catatan tersebut perlu dilengkapi dengan bukti peminjaman dan diarsipkan.

## 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi cukup baik dari segi internal pihak organisasi setiap pengeluaran kas harus dilaporkan kepada kepala bagian keuangan dan dari bagian keuangan kepada pimpinan setiap bulannya, kasubag juga melakukan evaluasi bersama pegawai keuangan untuk mengevaluasi dan memperbaiki apa yang masih kurang. Namun untuk

informasi mengenai laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja keuangan tidak dipublikasikan kepada masyarakat tiap tahun. Harusnya dipublikasikan agar masyarakat mengetahui akuntabilitas kinerja keuangan organisasi tersebut baik dari segi laporan keuangan, program yang dicapai, dll.

## 5. Pemantauan

Pemantauan atau pengawasan sudah baik karena mendapat pengawasan dari Inspektorat dan BPKP secara berkelanjutan. Adanya pengawasan dan evaluasi kinerja secara internal di Dinas dan Bagian keuangan tersebut secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Namun auditor internal tidak melakukan pemeriksaan secara mendadak melainkan berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, sehingga bagian keuangan mengetahui kapan auditor ingin mengaudit pengeluaran kasnya.

### Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Antara PP. No. 60 Tahun 2008 dengan Sistem Pengendalian Internal di Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya

No	Unsur-Unsur SPIP	PP No.60 th. 2008	SPIP Pengeluaran Kas di BapemKesra	Keterangan
1.	Lingkungan Pengendalian	<p>a. Penegakan integritas dan nilaietika</p> <p>b. komitmen terhadap kompetensi</p> <p>c. Kepemimpinan yang kondusif</p> <p>d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan</p>	<p>a. Pemimpin menanamkan nilai-nilai integritas kepada para pegawai dengan menerapkan tindakan disiplin terhadap aturan yang berlaku</p> <p>b. Selalu mengembangkan potensi para tenaga kerja dengan selalu mengarahkan mereka untuk bekerja secara professional serta memberikan pelatihan-pelatihan yang dijadwalkan oleh BPKAD</p> <p>c. Pimpinan melakukan interaksi dengan para pegawai yang ada dan selalu melakukan diskusi kepada para pegawai agar pengendalian intern semakin memadai</p> <p>d. Dengan menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan di Dinas tersebut</p>	<p>a. Sudah sesuai karena menjunjung nilai-nilai integritas dalam kepemimpinan</p> <p>b. Sudah sesuai namun pelatihan yang diberikan tidak maksimal dan merata harusnya pelatihan bisa merata di seluruh pegawai keuangan dengan membuat jadwal rotasi pelatihan</p> <p>c. Sudah sesuai dan harus dilakukan secara berkelanjutan</p> <p>d. Sudah sesuai dan harus selalu menyesuaikan dengan</p>

No	Unsur-Unsur SPIP	PP No.60 th. 2008	SPIP Pengeluaran Kas di BapemKesra	Keterangan
		<p>e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat</p> <p>f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia</p> <p>g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.</p>	<p>e. Terdapat perangkapan tugas oleh pegawai bagian keuangan yang juga mengerjakan fungsi akuntansi</p> <p>f. Perekrutan sumber daya manusia melalui serangkaian test dan klasifikasi yang ditentukan oleh bagian SDM, namun masih terdapat pegawai khususnya di bagian keuangan yang berkaitan dengan kas yang kurang mengerti atau pemahaman terkait pengeluaran kas seperti dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas dan peraturan mengenai SPIP</p> <p>g. Adanya kegaitan pengawasan internal dalam BapemKesra tersebut khususnya pengawasan terhadap pengeluaran kas.</p>	<p>perubahan kebutuhan organisasi tersebut</p> <p>e. Harusnya terdapat pegawai yang berasal dari jurusan akuntansi yang khusus mengerjakan fungsi akuntansi</p> <p>f. Harus ada pembinaan atau pemahaman secara berkelanjutan terhadap para pegawai yang dilakukan kepala Bagian atau Kasubag program, evaluasi, dan keuangan itu sendiri.</p> <p>g. Sudah sesuai dan harus dilakukan secara berkelanjutan.</p>
2.	Penilaian Resiko	Penilaian risiko dilakukan terhadap tujuan -tujuan yang ditetapkan pada instansi pemerintah dapat merugikan dinas.	Dalam melakukan analisa dibentuk bagian verifikasi khusus untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Dinas, sehingga sehingga setiap laporan keuangan dicek ulang oleh bagian verifikasi apakah sudah sesuai atau belum.	Sudah sesuai
3.	Aktivitas Pengendalian	<p>a.Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah</p> <p>b.Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah</p> <p>c.Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis</p> <p>d.Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai</p>	<p>a. Menerapkan sistem otorisasi atas dokumen pengeluaran kas seperti cap dan tanda tangan dari pejabat yang berwenang</p> <p>b. Pengendalian fisik atas dokumen dan catatan atas transaksi diarsipkan namun tidak adanya lemari penyimpanan yang terkunci dan bukti peminjaman</p> <p>c. Ada peraturan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran kas</p> <p>d. Terdapat prosedur pengeluaran kas secara tertulis</p>	<p>a. Sudah sesuai</p> <p>b. Kurang sesuai, seharusnya adanya lemari khusus yang dikunci untuk menghindari arsip atau dokumen yang penting dari orang yang tidak bertanggungjawab</p> <p>c. Sesuai</p> <p>d. Seharusnya dibuatkan agar pengeluaran kas terlaksana dengan baik</p>

No	Unsur-Unsur SPIP	PP No.60 th. 2008	SPIP Pengeluaran Kas di BapemKesra	Keterangan
		yang ditetapkan secara tertulis		
4.	Komunikasi dan Informasi	Pimpinan instansi pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus	Jika ada ketidakjelasan pada aktivitas pengeluaran kas maka bagian-bagian yang terkait dengan pengeluaran kas akan melakukan konfirmasi terkait dengan ketidakjelasan. Laporan mengenai aktivitas pengeluaran kas dalam laporan keuangan tidak dipublikasikan kepada masyarakat didalam websitenya	Harusnya dipublikasikan agar masyarakat mengetahui akuntabilitas kinerja keuangan dinas tersebut baik dari segi laporan keuangan, program yang dicapai, dll.
5.	Pemantauan	Penerapan kegiatan pengendalian dan komunikasi pengendalian yang terus menerus dilakukan pada suatu instansi pemerintah.	Mendapat pengawasan dari Inspektorat dan BPKP. Pengawasan dilakukan per semester sedangkan Pengawasan secara internal di lingkungan organisasi dan dibagian keuangan sendiri	Pemantauan sudah baik karena mendapat pengawasan dari Inspektorat. Adanya pengawasan dan evaluasi kinerja di Bagian keuangan tersebut secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dan berfungsi dengan baik

Sumber: Data di olah penulis, 2023

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sistem pengendalian intern sudah cukup baik sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal pemerintah dalam pengeluaran meliputi Lingkungan Pengendalian yang sudah adanya kepemimpinan yang kondusif, integritas, dan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, aktivitas pengendalian dengan adanya otorisasi hanya oleh pejabat yang berwenang, adanya pengendalian fisik atas dokumen, komunikasi dan informasi dengan melakukan konfirmasi terkait dengan ketidakjelasan dalam pengeluaran kas, serta pemantauan dengan mendapat pengawasan dari Inspektorat dan BPKP dan juga pengawasan secara internal di lingkungan Dinas dan dibagian keuangan sendiri, namun masih ada beberapa kendala, dapat dilihat dengan tidak meratanya pelatihan kepada pegawai berkaitan dengan pengeluaran kas, tidak adanya akuntan profesional, dan perangkapan tugas yang dapat dibuktikan mengenai fungsi keuangan merangkap menjadi fungsi akuntansi.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yang sesuai dengan kesimpulan pada penelitian di Bagian Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, yaitu:



1. Pihak Bapemkesra dapat menambah karyawan baru pada bagian akuntansi agar tidak terjadi perangkapan tugas yang akan menyebabkan pekerjaan terlambat dan membuka peluang untuk melakukan penyelewengan serta dapat menambah efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan;
2. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya diharapkan untuk tetap mengikutan peraturan yang berlaku dan juga mengikuti peraturan jika terjadi penyesuaian; dan
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dan dapat dipublikasikan kepada pihak eksternal maupun dipublikasikan di laman web Bapemkesra.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Dalrise, N. (2018). ALkuntalnsi Keualngaln Daleralh. Baldaln Penerbit Indeks.
- Devi, N. S. (2021). EVALLUALSI SISTEM PENGENDALLIALN INTERN TERHALDALP PENGELUALRALN KALS PALDAL LEMBALGAL PENDIDIKALN (STUDI KALSUS PALDAL SMPN 1 TELUK KUALNTALN).
- Halkim, AL. (2016). Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepallal Daleralh Di Eral Demokrasi Lalngsung (Sebuah Kaljialn Teoritik-Ketaltalnegralraln) (1st ed., Vol. 13). Journall Hukum IUS QUIAL IUSTUM.
- Malsalnale, W., Moralsal, J., & Budialrso, N. S. (2022). Ewallualsi Peneralpaln Sistem Pengendallialn Internall Pengelualraln Kals paldal Kalntor Kecalmaltaln Mallallalyalng Malnaldo (Vol. 5, Issue 2).
- Mulyaldi. (2016). Sistem ALkuntalnsi. Sallembal Empalt.
- Palngkey, J. N. D., Elim, I., & Rondonuwu, S. (2021). EVALLUALSI SISTEM PENGENDALLIALN INTERN PENGELUALRALN KALS PALDAL PT. BALNK SULUTGO CALBALNG UTALMAL EVALLUATION OF INTERNALL CONTROL SYSTEM CALSH DISBURSEMENTS OF PT. BALNK SULUTGO MALIN BRALNCH. 705 Journall EMBAL, 9(1), 705–713.
- PP No. 60 Talhun 2008. (n.d.). PP No. 60 Talhun 2008.
- Soemalrso, S. R. (2015). ALkuntalnsi Sualtu Pengalntalr. Sallembal Empalt.
- Trisalnngsih, S., & Fitri R., AL. (2022). PENGALRUH UKURALN PEMERINTALH DALN PENDALPALTALN ALSLI DALERALH (PALD) TERHALDALP KINERJAL KEUALNGALN PALDAL PEMERINTALH KOTAL SURALBALYAL. Journall of Economic, Business alnd ALccounting, 6(1), 301–310.
- Valn Slyke, D. M. (2006). ALgents or stewalrds: Using theory to understalnd the government-nonprofit sociall service contralcting relalntionship. Journall of Public ALdministraltion Research alnd Theory, 16(1), 23–45.